

RENJA
2022

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 106 dan 139 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa OPD harus menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setelah (RKPD) ditetapkan, untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini disusun dan merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang memuat penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian yang mengalami sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2022 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Magetan, 26 Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN



RUDY HARSONO, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19681201 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	I
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	19

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 mengacu pada RKPD tahun 2022. Disamping itu, penyusunan rancangan akhir Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2019-2023 sampai dengan tahun 2020, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terati langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023;

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
- b. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
- c. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024 ;
- b. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang dan seksi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renja OPD Tahun 2020 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja OPD dalam melaksanakan anggaran Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan Tahun 2020 terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, menurut kategori urusan wajib dan pilihan Pemerintah Daerah. target kinerja yang dicapai seluruh OPD merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2020 :

Tabel T-C.29

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pengakat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Magetan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)							Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan									
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3		4			5			6			7 = 6/5	8			9 = (4+6+8)			10 = (9/3)	
		K		RP	K		RP	K		RP	K		RP		K		RP	K		RP	
		VOL	SAT		VOL	SAT		VOL	SAT		VOL	SAT		VOL	SAT	VOL		SAT			VOL
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tenaga Keamanan yang Terlatih	75	%	4.170.600.000	30	%	144.735.727	30	%	265.000.000	21	%	103.602.327	71,58%							
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	5000	Orang	500.000.000	300	Orang	35.000.000	500	Orang	65.000.000	278	Orang	25.414.600	72,61%							
Peningkatan Kemampuan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Personil (Orang)	12500	Orang	1.370.000.000	110	Orang	109.735.727	110	Orang	200.000.000	69	Orang	78.187.727	71,26%							
Pengendalian Keamanan Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pelaksanaan Demokrasi (Kali)	2	Kali	2.300.600.000																	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	100	%	6.400.000.000	100	%	2.002.385.000	100	%	1.075.375.000	65	%	1.217.056.700	60,78%							
Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	Jumlah Event Perayaan Hari Besar yang Diamankan (Event)	65	event	4.000.000.000	13	Event	1.557.385.000	13	Event	690.375.000	7	Event	798.651.300	51,28%							
Pengamanan dan Pengawalan Event Daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Event Daerah (Kali)	3266	Kali	1.500.000.000	650	Kali	225.000.000	650	Kali	225.000.000	655	Kali	219.067.600	97,36%							
Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penertiban Pelanggaran K3 (Kali)	2300	kali	900.000.000	430	Kali	220.000.000	430	Kali	160.000.000	499	Kali	199.337.800	90,61%							
Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	100	%	2.125.000.000	100	%	210.000.000	100	%	219.000.000	113	%	209.459.199	99,74%							
Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani (%)	95	%	1.000.000.000	95	%	150.000.000	95	%	150.000.000	112	%	149.901.049	99,93%							
Sosialisasi Perda/ Perkada	Jumlah Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Perda/Perkada (Kelompok)	20	kelompok	875.000.000	1	Kelompok	10.000.000	1	Kelompok	19.000.000	1	Kelompok	10.000.000	100,00%							
Peningkatan Peran Penyidik PNS	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS (%)	95	%	250.000.000	95	%	50.000.000	95	%	50.000.000	106	%	49.558.150	99,12%							
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88	%	4.505.000.000	85	%	1.451.387.809	85	%	905.000.000	77	%	955.680.419	65,85%							
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi (Orang) ; Jumlah Dinas/Instansi/Pokmas yang	62 ; 50	Orang ; Kelompok	630.000.000	1 ; 1	Orang ; Kelompok	73.387.809	5 ; 10	Orang ; Kelompok	130.000.000	1	Orang ; Kelompok	13.387.809	18,24%							

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Unit)	24	Unit	1.500.000.000	11	Unit	523.000.000	11	Unit	300.000.000	10	Unit	373.519.797	71,42%							
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Penyediaan Operasional Penanggulangan Kebakaran (Bulan)	60	Bulan	2.375.000.000	12	Bulan	855.000.000	12	Bulan	475.000.000	12	Bulan	568.772.813	66,52%							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80	Angka	2.100.000.000	80	Angka	330.000.000	80	Angka	370.000.000	71	Angka	283.029.151	85,77%							
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	%	1.000.000.000	100	%	170.000.000	100	%	170.000.000	84	%	131.891.711	77,68%							
Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	5	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	18.020.000	90,10%							
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas (%)	100	%	1.000.000.000	100	%	140.000.000	100	%	180.000.000	89	%	133.117.440	95,08%							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (%)	100	%	10.635.000.000	100	%	960.500.000	100	%	1.175.000.000	92	%	795.961.065	82,87%							
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	16	unit	6.200.000.000	1	Unit	512.500.000	4	Unit	750.000.000	1	Unit	482.672.800	94,18%							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara (Unit)	201	unit	1.445.000.000	24	Unit	205.000.000	24	Unit	225.000.000	13	Unit	114.163.130	55,69%							
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehab Kantor (Paket)	1	paket	120.000.000	3	Paket	150.000.000	3	Paket	100.000.000	3	Paket	143.388.000	95,59%							
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Unit)	45	unit	500.000.000	11	Unit	85.000.000	11	Unit	80.000.000	6	Unit	48.062.235	56,54%							
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara (Unit)	300	unit	100.000.000	21	Unit	8.000.000	60	Unit	20.000.000	20	Unit	7.674.900	95,94%							
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Kelengkapan Pakaian Dinas Bagi Aparatur	100	%	540.000.000	100	%	110.000.000	100	%	110.000.000	138	%	103.226.950	93,84%							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Seragam Satpol PP dan Damkar yang Layak Pakai (Stel)	1080	stel	540.000.000	94 ; 1	Stel ; Set	110.000.000	94 ; 117	Stel ; Set	110.000.000	130 ; 162	Stel ; Set	103.226.950	93,84%							
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100	%	100.000.000	100	%	20.000.000	100	%	20.000.000	98	%	19.602.000	98,01%							
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Penganggaran	50	dokumen	100.000.000	10	Dokumen	20.000.000	10	Dokumen	20.000.000	10	Dokumen	19.602.000	98,01%							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																	9.875.390.514				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	30.900.000				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan														4	dok	7.600.000	4	dok	7.600.000	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														5	dok	23.300.000	5	dok	23.300.000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	9.275.655.640			9.275.655.640	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN, Tunjangan Beban Kerja dan Tunjangan Tamsil														14	bulan	9.272.756.640	14	bulan	9.272.756.640	100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD															2	dok	2.899.000	2	dok	2.899.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		245.939.850			245.939.850	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor															12	bulan	132.250.250	12	bulan	132.250.250	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															12	bulan	10.299.900	12	bulan	10.299.900	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															12	bulan	15.499.200	12	bulan	15.499.200	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan															12	bulan	10.922.000	12	bulan	10.922.000	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor															12	bulan	26.968.500	12	bulan	26.968.500	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															12	bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		59.409.024			59.409.024	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															12	bulan	39.499.024	12	bulan	39.499.024	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor															12	bulan	19.910.000	12	bulan	19.910.000	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		263.486.000			263.486.000	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															12	bulan	43.089.500	12	bulan	43.089.500	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															12	bulan	189.996.500	12	bulan	189.996.500	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor															1	unit	30.400.000	1	unit	30.400.000	100%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		1.148.191.000			1.148.191.000	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		959.191.000			959.191.000	100%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															345	kali	438.998.300	345	kali	438.998.300	100%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban Pelanggaran K3															450	kali	408.996.000	450	kali	408.996.000	100%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penertiban Pelanggaran K3															90	orang	36.197.650	90	orang	36.197.650	100%

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Personil														80	orang	74.999.050	80	orang	74.999.050	100%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota																	189.000.000			189.000.000	100%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi														1	kelompok	19.000.000	1	kelompok	19.000.000	100%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditang														95	%	130.000.000	95	%	130.000.000	100%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS														95	%	40.000.000	95	%	40.000.000	100%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																	1.108.000.000			1.108.000.000	100%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	1.080.000.000			1.080.000.000	100%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ; Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana														3 ; 12	jenis ; bulan	1.080.000.000	3 ; 12	jenis ; bulan	1.080.000.000	100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																	28.000.000			28.000.000	100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Dinas/Instansi/Pokmas yang Mendapat Pelatihan Penanggulangan Kebakaran ; Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi														7;0	kelompok; orang	28.000.000	7;0	kelompok; orang	28.000.000	100%
																	12.131.581.514			2.256.191.000	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK).

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 30
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2021

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD	CAPAIAN	TARGET TAHUN KE 3 PERIODE RPJMD	PROYEKSI CAPAIAN RKPD	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban , Ketentraman, Keindahan)	%	96%	97%	96%	96%	SATPOL PP DAN DAMKAR
	Persentase Penegakan Perda	%	96%	97%	96%	96%	SATPOL PP DAN DAMKAR
	Tindak Lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban Umum (SPM)	%	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP DAN DAMKAR
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	85%	85%	85%	85%	SATPOL PP DAN DAMKAR
	presentase pemenuhan SPM tingkat waktu tanggap (response Time rate) layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	65%	77%	70%	70%	SATPOL PP DAN DAMKAR

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Isu-isu strategis mendasar yang harus segera tertangani adalah sebagai berikut:

1. Penanganan masalah pelanggaran perda di tingkat kecamatan;
2. Peningkatan intensitas patroli di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum;
3. Wilayah perbatasan sering terjadi masalah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3);
4. Keberadaan Sosial Media menyebabkan maraknya penyebaran isu-isu/hoax;
5. Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing.
6. Banyaknya kejadian kebakaran di wilayah yang jauh dari jangkauan Mako Satpol PP dan Damkar

Disamping isu tersebut yang tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan personil dalam menghadapi kejadian insidentil, baik itu gangguan ketentraman dan ketertiban umum maupun kejadian kebakaran. Tahun 2022 akan ada penambahan sarana prasarana untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan beranggotakan 109 personil, dimana jumlah tersebut masih sangat kurang untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lapangan. Penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional yang mumpuni sangat dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan sehingga tugas-tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Tabel TC 31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Magetan

Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. MAGETAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Magetan			9.920.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Magetan			9.920.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan			37.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan			37.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	29.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	29.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan			6.403.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan			6.403.000.000	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5,766,158,288	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	9.272.756.640	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	3.000.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Magetan			110.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Magetan			155.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Magetan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	220 stel	110.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Magetan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	282 stel	155.000.000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan			450.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan			450.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	140.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	140.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	45.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	200.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Magetan			2.550.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Magetan			2.550.000.000	
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	2.550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	2.550.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan			70.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan			70.000.000	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Unit	20.000.000	
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan			300.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan			300.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	240.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Magetan			2.135.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Magetan			2.135.000.000	
3	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan			1.710.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan			1.710.000.000	

	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Magetan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	570 kali	725.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Magetan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	570 kali	725.000.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Magetan	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	660 kali	600.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Magetan	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	660 kali	600.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Magetan	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	264 kali	100.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Magetan	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	264 kali	100.000.000	
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Magetan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	304 kali	285.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Magetan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	304 kali	285.000.000	

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan			425.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan			425.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	9 kelompok	175.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	9 kelompok	175.000.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	98 persen	200.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	98 persen	200.000.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	98 persen	50.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	98 persen	50.000.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Magetan			2.740.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Magetan			2.740.000.000	

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan			2.700.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan			2.700.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	2.700.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	2.700.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Magetan			40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Magetan			40.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	9 kelompok	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	9 kelompok	40.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2022 Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Nihil				
1					
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu poin Prioritas Nasional adalah stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat kerja daerah yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Disamping itu saat ini Pemadam Kebakaran ikut bergabung menjadi satu kesatuan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Melihat dari fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkup daerah yakni Kabupaten Magetan. Situasi daerah yang aman dan kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, situasi aman tentram dari potensi pelanggaran Perda dan Kejadian Kebakaran akan bisa diwujudkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

- Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis

2. Sasaran

- Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran

Tabel T-C. 3.3
Target sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
tahun 2022 :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	97 %
			Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	100 %
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Presentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	100 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	a.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	a.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	b.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	b.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	c.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	d.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	d.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	d.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	d.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	d.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	
	d.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	e	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
	e.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	

	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	e.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	e.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	f.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	f.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	a.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
	a.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
	a.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	
	b.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	
	b.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	
	b.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	

3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		a.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
		b.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel T-C. 34

TABEL TC 3.4
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja false			Rencana Tahun 2022				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Progra m	Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								10.052.158.288				14.521.700.000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.735.502.550				7.616.700.000	
1	05	001	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.000.000				38.500.000	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	79,5 SK OR	4 Dokumen	9 dokumen	7.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	8,500,000
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	5 Dokumen	9 dokumen	2.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	30,000,000
1	05	001	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.260.068.550				6.503.200.000	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	79,5 SK OR	14 Bulan	14 bulan	8.257.068.550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	6,500,000,000
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	79,5 SK OR	2 Dokumen	14 bulan	3.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	3,200,000
1	05	001	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60.000.000				155.000.000	

1	5	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	141 stel	220 stel	60.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	155,000,000
1	05	001	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah									165.800.000				525,000,000
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	58.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	145,000,000
1	5	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	15.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	35,000,000
1	5	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	24.800.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	50,000,000
1	5	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	8.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	25,000,000
1	5	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	10.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	20,000,000

1	5	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	250,000,000
1	05	001	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.000.000				80,000,000	
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	40.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	55,000,000
1	5	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	60 Unit	12 bulan	15.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	25,000,000
1	05	001	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								185.634.000				315,000,000	
1	5	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	35.634.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	65,000,000
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota	79,5 SK OR	12 Bulan	12 bulan	150.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		"Indeks Kepuasan Masyarakat - persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi - persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu"	79,5 SK OR	250,000,000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								1.040.000.000				4,165,000,000	
1	05	002	2.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								665.000.000				3,565,000,000	
1	5	2	2.0	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	Jumlah pengamanan dan pengawalan event daerah	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kab/kota	60; 100 %	570 kali	360 kali	500.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	2,550,000,000

1	5	2	2.0 1	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	Jumlah penertiban K3	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Semua Kab/Kota	60; 100 %	400 kali	360 kali	100.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	620,000,000
1	5	2	2.0 1	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Semua Kab/Kota	60; 100 %	90 Orang	360 kali	45.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	100,000,000
1	5	2	2.0 1	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	Jumlah peserta peningkatan kemampuan SDM personil	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Semua Kab/Kota	60; 100 %	50 Orang	360 kali	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	295,000,000
1	05	002	2.0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								375.000.000				600,000,000	
1	5	2	2.0 2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani	Semua Kab/Kota	60; 100 %	9 kelompok	95 %	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	75,000,000
1	5	2	2.0 2	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani	Semua Kab/Kota	60; 100 %	95 persen	95 %	150.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	200,000,000
1	5	2	2.0 2	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani	Semua Kab/Kota	60; 100 %	95 persen	95 %	200.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	60; 100 %	325,000,000
1	5	4	2.0 1		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								1.853.502.000				2,740,000,000	
1	05	004	2.0		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.843.502.000				2,700,000,000	
1	5	4	2.0 1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota	88 %	12 bulan	12 bulan	1.843.502.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88 %	2,700,000,000
1	05	004	2.0		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								10.000.000				40,000,000	
1	5	4	2.0 4	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Semua Kab/Kota	88 %	9 kelompok	10 Kelompo k	10.000.000	Pendapatan Bagi Hasil pajak (DBH PROV)		Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88 %	40,000,000
TOTAL													10,052,158,288				14,521,700,000	

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, semua pejabat pelaksana teknis kegiatan harus segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Untuk menjamin sinergisitas dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan agar setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan selalu melakukan koordinasi lintas bidang maupun instansi terkait agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

- a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini merupakan pedoman dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022;
- c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing Bidang dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan. Oleh karena itu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi untuk mencapai target pada setiap kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, serta dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulannya agar

dapat diketahui progres pencapaian target beserta kendalanya.

Magetan, 26 Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN

